

Moralitas Seorang Pemimpin dalam Bernegara Prespektif Etika Politik Islam

Ali Zaenal Abidin Hasan¹, Husairi², Kurniati³

Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: 10200122063@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *Political ethics in Islam has a very important role in the state, especially in upholding the morality of a leader. The difference in morals, and ethics lies in the foundation used to judge good and bad. Therefore, the principles of Islamic political ethics that a leader should adhere to include mutual respect, recognising the rights of others, accepting various views, and avoiding the suppression of one's own will. The actualisation of morals includes how a person applies their faith and applies Islamic teachings in every daily action, both in relationships with God, self, and fellow humans. This research uses a qualitative approach with the Islamic law literature review method. This method involves searching and analysing references from books and journals that discuss the Morality of Leaders in the State from the Perspective of Islamic Political Ethics. A leader must not only have good morality, but also be intelligent, competent in his field, and wise in solving problems, to create an ideal leader with good morality.*

Keywords: *Morality, Leader, Islamic Political Ethics*

Abstrak. Mengenai etika politik dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam bernegara, terutama dalam menegakkan moralitas seorang pemimpin. Perbedaan dalam akhlak, dan etika terletak pada landasan yang digunakan untuk menilai baik dan buruk. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika politik Islam yang harus dipegang oleh seorang pemimpin termasuk saling menghormati, mengakui hak orang lain, menerima berbagai pandangan, dan menghindari penekanan kehendak sendiri. Aktualisasi akhlak mencakup bagaimana seseorang menerapkan iman mereka dan menerapkan ajaran Islam dalam setiap tindakan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, maupun sesama manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka hukum islam. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis referensi dari buku dan jurnal yang membahas Moralitas Pemimpin Dalam Bernegara Perspektif Etika Politik Islam. Seorang pemimpin tidak hanya harus memiliki moralitas yang baik, tetapi juga cerdas, kompeten di bidangnya, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah, untuk menciptakan pemimpin ideal dengan moralitas yang baik.

Kata Kunci : Moralitas, Pemimpin, Etika Politik Islam

PENDAHULUAN

Membahas masalah etika dan politik penting dalam islam, karena berbagai alasan antara lain: Pertama, politik dianggap sebagai bagian dari ibadah karena harus dilakukan berdasarkan prinsip ibadah. Misalnya dalam politik harus niat karena Lillahi taala. Dalam berpolitik kita tidak boleh melanggar perintah ibadah, karena melanggar ajaran ibadah dapat merusak “kesucian” politik itu sendiri. Kedua, etika politik dianggap penting dalam islam karena politik terkait erat dengan prinsip-prinsip agama islam dalam mengatur masyarakat(Dahlan, 2021).

Dalam berpolitik, hal ini seringkali melibatkan hubungan antara manusia, seperti saling menghormati, menghormati hak orang lain, saling menerima, dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Menurut saya, inilah prinsip-prinsip hubungan antar manusia yang harus diterapkan dalam dunia politik kita saat ini. Namun, beberapa pengamat politik justru

mempunyai pandangan sebaliknya, bahkan skeptis: “mereka mengatakan bahwa membahas etika politik itu seperti menangis di gurun pasir” mereka menambahkan bahwa “moralitas politik adalah omong kosong.” Menurutnya, realitas politik pada hakikatnya adalah perebutan kekuasaan dan kepentingan serta tidak ada hubungannya dengan moralitas. Politik tidak dibangun dari suatu cita-cita, tidak mengikuti apa yang seharusnya. Dalam politik, kecendrungan umumnya adalah bahwa tujuan menghalalkan cara seperti yang diajarkan sang filsuf Machiavelli (Budiarjo et al., 2022).

Dari gambaran singkat di atas, tentu saja salah satu filsufi, Immanuel Kant, pernah bercanda bahwa ada dua kepribadian binatang yang tersembunyi dalam diri setiap “politisi” kepribadian binatang ular. Politisi terkadang memiliki kepribadian seperti merpati, lemah lembut dan mulia dalam memperjuangkan cita-citanya. Namun di sisi lain, ia terkadang juga memiliki kepribadian ular yang licik dan kejam, selalu berusaha menyerang merpati. Namun sayangnya yang sering dimiliki para politisi hanyalah sisi “ular” dan bukanlah sisi “merpati”.

Dari sikap tersebut timbullah pemikiran bahwa politik itu kotor, penuh tipu daya, licik dan kejam dalam mencapai tujuan, dan pandangan ini masih dianut oleh sebagian, bahkan mayoritas masyarakat, dan tentunya hal ini bahkan merusak makna politik padahal, menurut filsuf Aristoteles, politik itu sendiri mempunyai tujuan yang mulia. Di sini lah etika politik berperan penting sebagai alternatif perilaku politik yang santun untuk mewujudkan negara yang damai, aman, dan progresif (Rohim Yunus & :, 2014).

Manfaat moralitas politik tidak lah nyata. Ia tidak bertanggung jawab untuk mengkhutbahi kepada politisi atau secara langsung mempertanyakan legitimasi moral suatu keputusan. Namun, etika politik mensyaratkan bahwa setiap klaim atas hak untuk mengatur masyarakat harus dibenarkan oleh prinsip-prinsip moral dasar.

Etika politik dapat memberikan standar orientasi dan pedoman normatif bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin menilai kualitas tatanan politik dan kehidupan dalam kaitannya dengan martabat manusia. Oleh karena itu, isu sentral etika politik adalah legitimasi moral dari kemungkinan kekuasaan, yang menjadi pertanyaan adalah dengan hak moral apakah seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan sesuai kebijaksanaannya? Setiap pemimpin selalu menghadapi kebutuhan akan tanggung jawab ini tidak diberikan, maka hak tersebut tidak berlaku lagi (Kurniawan, 2021).

Dari latar belakang permasalahan dipahami bahwa politik dan moralitas pemimpin serta perkembangannya tidak dapat lepas dari nilai-nilai dasar hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat tata nilai dan etika dalam melakukan pertumbuhan dan perkembangan yang dibutuhkan dan sesuai kondisi masyarakat.

Maka dari itu peneliti akan berfokus pada "Moralitas Pemimpin Dalam Bernegara Perspektif Etika Politik Islam". Penelitian ini bertujuan memahami moralitas pemimpin dalam bernegara dapat diintegrasikan ke dalam etika politik Islam dan mencari cara untuk membangun moralitas pemimpin dalam bernegara berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks etika politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka hukum Islam. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis referensi dari buku dan jurnal yang membahas Moralitas Pemimpin Dalam Bernegara Perspektif Etika Politik Islam. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik etika politik Islam. Selanjutnya, konsep-konsep kunci yang dikemukakan dalam referensi tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana etika politik Islam mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini berfokus pada penarikan poin-poin penting dari setiap konsep yang ditemukan dalam literatur, guna membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan etika politik Islam dalam tata kelola yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Dan Politik

Dalam Bahasa Indonesia "etika" berarti "ketenangan", yang merupakan gabungan dari kata Sanskerta "Su" yang berarti baik dan "Sila" yang berarti standar atau prinsip dasar kehidupan. Etika melibatkan perilaku manusia untuk bertindak dengan benar. Oleh karena itu, moralitas selalu cenderung ke arah perbuatan baik. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani yaitu "Ethos" yang berarti adat istiadat atau watak. Kata tersebut mirip dengan kata moral dengan Bahasa Latin "Mos" (jamaknya Mores) yang juga berarti adat istiadat atau cara hidup. Oleh karena itu, kedua kata ini (Etika dan Moral) merujuk pada cara bertindak yang telah menjadi kebiasaan berdasarkan kesepakatan atau praktik sekelompok orang. Dengan demikian, moralitas dapat dipahami sebagai kesediaan jiwa manusia untuk selalu mengikuti dan menaati seperangkat kaidah moral.

Etika dan moralitas secara teoritis sama-sama berasal dari pengetahuan (cognitive) dan bukan dari efisiensi. Etika juga dikaitkan dengan jiwa dan semangat suatu masyarakat. Etika muncul ketika dikaitkan dengan Masyarakat, tanpa Masyarakat tidak ada moralitas dan tidak ada masyarakat tanpa moralitas, dikaitkan dengan kesadaran dan kolektif masyarakat (Setiawan & Alfiani, 2019). Oleh karena itu, etika merupakan filsafat fundamental dan mencerminkan

ajaran dan pandangan moral. Bagaimana seseorang harus hidup dibahas dalam etika; sedangkan etika ingin mempertimbangkan mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana mereka mengambil sikap pertanggung jawaban terhadap ajaran moral yang berbeda (Handoyo & Munandar, 2016).

Sedangkan pengertian politik dilihat dari segi etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang berarti kota yang berstatus negara kota. Politik yang berkembang di Yunani pada saat ini dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik telah menjelaskan politik dengan berbagai cara, sehingga definisi yang berbeda-beda telah memperkaya pemikiran tentang politik. Jibril A. Almond mengartikan politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pengambilan keputusan publik pada masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu, dimana pengendalian tersebut didukung oleh instrumen yang bersifat otoriter dan paksaan (Muthari Ramdhani Muhammad dkk, 2022).

Hubungan Etika, Politik, dan Berkaitannya Dengan Moral

Hubungan antara etika dan politik adalah sesuatu yang tampaknya jelas pada pandangan pertama, namun kompleks ketika kita mempertimbangkan realitas peradaban dan kehidupan manusia. Dalam konteks Islam, etika politik memegang peranan yang sangat penting. Karena politik dianggap sebagai bagian dari ibadah, pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip ibadah. Selain itu, politik juga berkaitan dengan prinsip pengelolaan masyarakat, sehingga nilai-nilai seperti saling menghormati dan menolak pemaksaan pendapat harus terintegrasi dalam ranah politik.

Beberapa para ahli mengemukakan pendapat mereka terkait dengan hubungan etika dan politik :

1. Aristoteles

Menurut Aristoteles, etika dan politik memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Aristoteles mengembangkan teori politiknya dalam karyanya yang terkenal, *Politics*, dengan landasan dari prinsip-prinsip etikanya yang terdapat dalam *Nicomachean Ethics*. Bagi Aristoteles, politik tidak hanya berkaitan dengan etika, tetapi politik sendiri menyiratkan adanya etika, sementara etika mencapai puncaknya dalam politik. Dalam pandangan Aristoteles, hubungan antara etika dan politik dijelaskan dengan jelas di awal buku *Nicomachean Ethics*, di mana Aristoteles mengemukakan beberapa prinsip mendasar terkait etika. Etika Aristoteles menekankan konsep kebaikan, yang berarti bahwa tujuan dari setiap aktivitas adalah mencapai kebaikan. Setiap tindakan haruslah ditujukan kepada mencapai

kebaikan. Titik awal Aristoteles dalam menekankan telos (tujuan) ini dapat dianggap sebagai akar dari teologisme dalam etika (Bera, n.d.).

2. Machiavelli

Menurut Machiavelli, Politik tidak melibatkan etika kebajikan manusia seperti yang dipahami oleh para filsuf tradisional/klasik (Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas). Politik dengan demikian dibebaskan dari kaitannya dengan etika. Politik mempunyai jalur prioritas tersendiri, terkait dengan keutuhan wilayah negara. Kebijakan hendaknya diambil dengan tujuan menjaga stabilitas tahta dan keutuhan negara dari berbagai ancaman. Realisme Machiavellian merevolusi visi politik tradisional (sistem hidup berdampingan). Oleh karena itu, teori politik yang licik akan memonopoli politik sebagai semacam “lubang tanah” tanpa etika.

Maka, dengan mengesampingkan berbagai pertimbangan khalayak yang terlibat dalam suatu permasalahan politik, Machiavelli mengajak kita untuk mempertimbangkan satu atau dua permasalahan moral yang muncul dalam kenyataan. Ia sangat yakin bahwa sulit bagi seorang pangeran untuk menjadi raja (pemimpin) sekaligus orang yang berbudi luhur. Kesulitan ini harus dikenali dan dijadikan titik awal dalam pengembangan kebijakan. Artinya, jika perlu melakukan penipuan dan kejahatan untuk melindungi kekuasaan dan stabilitas wilayahnya, pangeran tidak boleh merasa bersalah dengan cara tersebut. Hal ini harus ditekankan karena jika ia rajin mengamalkan kebajikan, sang pangeran akan terjerumus ke dalam kehancuran dirinya dan kekuasaannya (Zein, 2019).

3. Thomas Hobbes

Menurut Hobbes, manusia lebih banyak dipengaruhi oleh passion daripada akal budinya. Dengan kata lain, etika bukanlah sesuatu yang alami atau kodrati bagi manusia sejak awal. Oleh karena itu, Hobbes menyebut manusia dalam keadaan kodratnya sebagai homo homini lupus. Namun, dalam keadaan alamiahnya, manusia tidak dapat dianggap buruk, jahat, atau sejenisnya karena, sekali lagi, dalam keadaan alamiah ini tidak ada etika yang menetapkan standar baik-buruk, adil-tidak adil, atau lainnya. Aktivitas menjadi "baik" atau bertindak "baik" seperti yang dimaksudkan oleh etika tidak relevan dalam keadaan alamiah. Manusia dalam keadaan alamiah berjuang untuk mempertahankan hidup mereka dari ancaman kematian. Ironisnya, karena ancaman ini dialami oleh semua orang, manusia dalam keadaan alamiah dianggap setara. Berbeda dengan pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia beragam dalam kodratnya (ada yang lahir sebagai "warganegara", ada yang sebagai "budak"), Hobbes menegaskan kesetaraan kodrat manusia (W.Dewantara, 2021).

Apa yang dikemukakan Aristoteles ternyata jelas sangat berbeda dengan yang dikemukakan Machiavelli. Machiavelli menegaskan ada jurang pemisah antara politik dan moralitas. Baginya, politik adalah pertanyaan tentang bagaimana orang mengatur kehidupan mereka saat ini (bagaimana seseorang hidup), dan etika adalah pertanyaan tentang seberapa baik seseorang harus bertindak (*how well one* seharusnya bertindak). Machiavelli berpendapat bahwa apa yang terjadi saat ini tidak bisa begitu saja disamakan dengan apa yang seharusnya terjadi. Politik adalah tentang kekuasaan yang dimiliki masyarakat dan tidak ada hubungannya dengan prioritas. Oleh karena itu, politik dipisahkan dari etika.

Tindakan etis Aristoteles disebut *actus humanus* (sesuai dengan kodrat akal budi), sedangkan tindakan etis Hobbesian disebut *actus legal* (sesuai dengan kodrat hukum). Pemikiran etis Aristoteles tidak mempertimbangkan keadaan alamiah (*state of nature*) karena manusia menemukan "*nature*" mereka dalam polis (sistem kehidupan bersama). Sebaliknya, pemikiran etis Hobbes mengasumsikan keadaan alamiah karena kodrat manusia tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari kehidupan di mana semua aktivitas manusia teratur dalam masyarakat politik.

Secara umum, etika sering diidentifikasi dengan moralitas. Di dalam bahasa Arab, padanan kata untuk etika adalah al-adab. Umat Islam biasanya menganggap etika, moral, dan akhlak sebagai hal yang sama. Meskipun semuanya berkaitan dengan nilai baik dan buruk dari tindakan manusia, masing-masing memiliki perbedaan dalam pemahamannya. Secara sederhana, sementara moral lebih fokus pada penilaian nilai baik dan buruk dari setiap tindakan manusia itu sendiri, etika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau *ilm al-akhlaq*), sementara moral adalah praktiknya. Apa yang dikemukakan Aristoteles ternyata sangat mengejutkan (Satriani et al., 2021).

Dengan demikian, jika kita membedakan antara moral dan etika, maka moral (akhlak) dapat dipandang sebagai norma-norma normatif yang mengikat yang berlaku di dalam konteks sosial yang spesifik, yang terbatas oleh parameter ruang dan waktu.

Prinsip Moralitas Pemimpin dalam Bernegara Etika Politik Islam

Istilah moral dalam Islam dikenal sebagai al-akhlaq atau al-adab. Menurut Imam al-Ghazali, akhlak didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk berperilaku tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan yang panjang. Jika perilaku tersebut menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun dalam konteks agama, maka perilaku tersebut dapat disebut sebagai akhlak yang baik (Satriani et al., 2021).

Didalam etika yang menjadi penilaian baik dan buruk didasarkan pada pendapat akal, maka yang menjadi tolak ukur dalam menilai moral (moralitas) dalam islam untuk digunakan dalam menentukan baik dan buruknya yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Etika berkaitan dengan tingkah laku manusia secara umum, sedangkan etika mengungkapkan ukuran tersebut dalam bentuk tindakan(Susyana, 2022).

Prinsip moral (Moralitas) yang harus kita liat dari seseorang jika kita menggunakan perspektif etika politik islam ialah(Prasetyo, 2014) :

1. Bertaqwa kepada Allah
Sebagai salah satu syarat muthlak sebagai pemimpin, yang telah menjadi karakter kepribadiannya
2. Amanah
Artinya jika ia diberi kepercayaan tidak akan khianat (dapat bertanggung jawab), dapat bertindak adil dan profesional. Sifat ini harus menetap pada seseorang jauh sebelum dia menjadi seorang pemimpin.
3. Shiddiq
Memiliki kejujuran penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, agar masyarakat dapat percaya terhadap pemimpin yang mereka pilih.
4. Fathonah
Artinya pintar, cerdas, cermat, cepat mengambil keputusan, dan dapat memahami segala permasalahan.
5. Pemaaf
Manusia tidak dapat menghindari kesalahan dan dosa karena keterbatasan pengetahuan dan kapasitas mereka. Rasulullah menunjukkan sikap pemaaf yang besar meskipun beberapa kesalahan yang fatal dilakukan oleh beberapa sahabatnya, yang mengakibatkan kekalahan umat Muslim dalam Pertempuran Uhud. Beliau dengan tulus memaafkan mereka dan mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan.
6. Senang Bermusyawarah
Musyawarah ialah mengeluarkan atau mengajukan pendapat, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan, dan bukan untuk memaksakan sebuah kehendak dan merasa benar sendiri.

Oleh karena itu etika dan moral sangat Penting seorang pemimpin karena ia menjadi sosok pelopor dalam melaksanakan kebijakan dalam suatu negara, menjadi penentu arah nasib suatu bangsa dan masyarakatnya, sehingga seorang pemimpin perlu memiliki aklak, etika dan moralitas yang baik dalam bernegara. Maka pada prinsipnya seorang pemimpin bukan hanya

sekedar mengatur sistem pemerintahan, juga tentunya memiliki prinsip moral etika yang baik dalam mengatur segala sistem pemerintahan, menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya, tradisi masyarakat sosial serta nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Seorang Pemimpin dalam bernegara tak hanya menjadi suri tauladan, ia juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam berperilaku dan bertindak maka sosok pemimpin yang baik harus menanamkan pada dirinya prinsip akhlak, etika dan moralitas yang baik.

Eksistensi Moralitas Etika Politik Islam Dalam Pemimpin Bernegara

Dalam dunia politik, etika yang baik sangatlah penting. Penerapan alur kebijakan yang etis dan tepat sangatlah penting, karena dari suatu proses yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, Karena suatu kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah timbul dari kerja otoritas yang melaksanakan kebijakan tersebut, maka etika yang baik juga mempengaruhi kebijakan tersebut. Jadi, hal-hal kecil yang dilakukan dalam dunia politik harus tetap diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menerapkan etika politik islam, pejabat publik pada dasarnya bebas berperilaku dengan cara yang mencapai seni dan kreativitas dalam menjalankan wewenangnya. Hal ini terkait erat dengan implikasi kebijakan saat ini. Secara spesifik, politik adalah seni meraih kekuasaan dalam buku Miriam Budiardjo(Dahlan, 2021), namun kajian etika politik islam mengarah pada pembahasan moral dan prinsip-prinsip etika politik, yang dikaitkan dengan perilaku seorang politikus dalam menjalankan wewenangnya.

Etika berfungsi mempelajari dan mengkaji aspek tingkah laku dan tindakan manusia. Etika menilai apakah perilaku itu benar atau salah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Setiap perbuatan manusia dilakukan secara sadar dan dengan usaha dalam hubungan dengan Tuhan, dengan manusia lain, dengan lingkungan, dengan diri sendiri, dan sebagainya, yang kesemuanya mengandung nilai-nilai moral. Segala tindakan manusia, baik pribadi, sosial, politik, dan budaya mengandung nilai-nilai moral yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terlibat di dalamnya. Nilai moral yang buruk akan berujung pada penyesalan.

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa etika yang disebutkan dalam Al-Quran bersifat khusus karena bersifat umum, tanpa ada pembedaan antara bangsa yang satu dengan yang lain, dari golongan yang satu dengan golongan yang lain. Etika itu istimewa karena mempunyai keseimbangan, yaitu memberdayakan pikiran, hati dan tubuh, seperti halnya memberdayakan individu dan masyarakat agar tidak ada orang yang bertindak tidak adil terhadap orang lain(Fata, 2012).

Acuan perbuatan baik dan buruk harus mengacu pada peraturan Tuhan. Apa yang dianggap baik oleh Tuhan pada dasarnya pasti baik. Berbohong tidak bisa dianggap sebagai perbuatan baik, karena berbohong pada hakikatnya buruk. Rasulullah SAW selalu memerintahkan umatnya untuk meneladani sifat-sifat Allah semaksimal mungkin. Hiduplah secara etis sesuai dengan etika Tuhan. Sedangkan Aisyah ditanya tentang kepribadian Nabi SAW. Dia membalas. Karakter Nabi SAW adalah Al Quran.

Etika dalam islam mempunyai arti yang lebih luas dari pada etika pada umumnya, meskipun sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia yang ditujukan pada kesempurnaan dan kesucian hidup. Etika hanya terbatas pada tingkah laku lahiriah, aspek ekspresif dalam kehidupan sosial, timbul dari luar dan di dalam masyarakat, bersifat relatif dan terikat pada ruang dan waktu, sedangkan etika merujuk pada hubungan masyarakat dan pemimpinnya, dan produk budaya yang dapat berubah tergantung masyarakat yang menerapkannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik dianggap sebagai bagian dari ibadah karena harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Dalam konteks ini, niat dalam berpolitik haruslah murni karena Allah SWT. Dalam berpolitik, penting untuk tidak melanggar prinsip-prinsip ibadah, karena pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan dapat merusak kesucian politik itu sendiri. Etika politik dianggap krusial dalam Islam karena politik erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur masyarakat. Dalam berpolitik, seringkali melibatkan interaksi antarmanusia, seperti saling menghormati, menghargai hak orang lain, menerima pendapat orang lain, dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Etika mempertimbangkan apakah suatu perilaku benar atau salah, dan apa yang diperbolehkan atau tidak. Setiap tindakan manusia, baik dalam aspek pribadi, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya, memiliki dimensi moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terlibat. Nilai-nilai moral yang buruk dapat menghasilkan dampak yang merugikan. Para filsuf dan teolog sering mendiskusikan makna kebaikan dan kejahatan, serta siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Etika politik Islam sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam aspek moralitas seorang pemimpin. Perbedaan dalam akhlak, etika, dan moralitas terletak pada landasan yang digunakan untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika politik Islam yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin termasuk saling menghormati, menghargai hak orang lain, menerima pendapat

orang lain, dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman dan menjalankan ajaran Islam dalam setiap perilaku sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, maupun sesama manusia. Seorang pemimpin tidak hanya perlu memiliki moralitas yang baik, tetapi juga cerdas, kompeten dalam bidangnya, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah, sehingga tercipta pemimpin ideal yang mengedepankan moralitas yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bera, K. (n.d.). *Relevansi Etika-Politik Menurut Aristoteles Bagi Kehadiran Politik Kebohongan Di Indonesia*.
- Budiarjo, T., Andre, H., Yani, Y., Stepen Ananda, A., & Nyipa, Y. (2022). Etika Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat Menurut Pandangan Machiavelli. *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i3.1262>
- Dahlan, D. (2021). *Etika Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat Menurut Pandangan Machiavelli*.
- Fata, A. K. (2012). *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*. 02, 1–15.
- Handoyo, E., & Munandar, M. A. (2016). *Etika politik* (Cetakan II). Widya Karya Press-Semarang.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Etika Politik & Pemerintahan* (Cetakan I). Pusaka Media.
- Muthari Ramdhani Muhammad dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (R. N (ed.); Cetakan I). CV. Widina Media Utama.
- Prasetyo, A. (2014). *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam* (W. Anggara (ed.); Cetakan I). Zifatama Jawara.
- Rohim Yunus, N., & : (2014). *Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan*. www.suaramerdeka.com.
- Satriani, I., Marilang, M., & Kurniati, K. (2021). Konflik Dan Ketegangan Antara Moral Dan Hukum Dalam Hukum Islam. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 2021. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5689>
- Setiawan, A., & Alfiani, F. E. (2019). Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 1(2), 2019.
- Susyana. (2022). *Ruang Lingkup Seputar Akhlak, Etika, Moral, Dan Kesusilaan*.
- W.Dewantara, A. (2021). *Filsafat Moral* (Marcell (ed.); Cetakan V). PT Kanisius.
- Zein, F. M. (2019). Kritik Konsep Politik Machiaveli Dalam Perspektif Etika Politik Islam. *Jurnal Mahkamah*, 1(2), 495.